

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025															
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI		
			TR1	TR2	TR3	TR4							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						14,6%		146%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50%	100%			Kegiatan 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/ Kota	15 dokumen	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	50.607.000	Bidang PGPP		23 Dokumen	153%
			50%	100%			2. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	15 orang	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG	40.000.000	Bidang PGPP		18 Orang	120%
			25%	50%	75%	100%	3. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 dokumen	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	695.964.200	Bidang PGPP		4 Dokumen	100%
					50%	100%		4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan PP kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	5 Lembaga (5 desa)	Terlaksananya kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Bidang PGPP		7 Lembaga
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan					Program Perlindungan Perempuan						100%		100%
							Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 Layanan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	5.186.936.000	Bidang PGPP		4 Layanan	400%
3.	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Angka Perceraian Kasar		50%	100%		Program Peningkatan Kualitas Keluarga						2%		100%
							Kegiatan 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	4 dokumen	Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	77.644.000	Bidang PGPP		4 Dokumen	100%
				50%	100%		2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupten/Kota	69.600.000	Bidang PGPP		30 Orang	100%
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK															
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Terlaksananya pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya	25%	25%	25%	25%	Program PERLINDUNGAN PEREMPUAN						100%		100%
							Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten yang mendapat layanan pengaduan	30 orang					47 Orang	156%
							Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten yang mendapat layanan pengaduan	30 orang	1. Terlaksananya layanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	Rp107.624.000	UPT PPA		47 Orang	156%
										2. Terlaksananya layanan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		UPT PPA			
										3. Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak pada waktu pelaporan ke polres dan persidangan		UPT PPA			
							Program PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
							Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang mendapat layanan pengaduan	30 orang	4. Terlaksananya rapat tim UPT PPA		UPT PPA			
							Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang mendapat layanan pengaduan	80 orang	5. Terlaksananya layanan penanganan psikologi/ spiritual korban kekerasan		UPT PPA			
										1. Terlaksanannya kegiatan trauma preventing bagi AMPK	Rp66.129.000	UPT PPA		86 Orang	107%
										2. Terlaksananya penjangkauan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus		UPT PPA			
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK															
1	Mewujudkan Kabupaten Tanjung jabung Barat Layak Anak	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	30%	23%	53%	-	* Program Pemenuhan Hak Anak						67,04%		126%
							Kegiatan 1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia	35 Lembaga PHA	Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah	257.035.000	Bidang PHA			

							usaha Sub Kegiatan a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	Usaha yang dibina		dan Dunia Usaha yang dibina					
							b. Koordinasi dan Sikronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah ,Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan dunia Usaha lainnya	45 Organisasi	Terlaksananya Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan dunia Usaha lainnya	167.202.000	Bidang PHA		45 Organisasi	100%
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sikronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	89.833.000	Bidang PHA		5 Dokumen	100%
							2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	20 Sekolah	terlaksananya kegiatan lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan Penguatan dan pendampingan	99.999.800	Bidang PHA		20 Sekolah	100%
							Sub Kegiatan a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan Penguatan dan pendampingan	3 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	49.999.800	Bidang PHA		3 Dokumen	100%
							b. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6000 Orang	Terlaksananya Kegiatan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Bidang PHA		6000 Orang	100%
		Persentase anak yang membutuhkan perlindungan	20%	16,90%	26,90%		* Perlindungan Khusus Anak 1. Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koorinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	30 layanan	terlaksananya kegiatan AMPK yang mendapatkan layanan	70.900.000	Bidang PHA	77,48%		259,13%
							Sub Kegiatan a. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan	30 Orang	terlaksananya kegiatan AMPK yang mendapatkan layanan	20.000.000	Bidang PHA	V	30 Orang	100%
							2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anakyang Memerlukan Perlindunagn Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Mermerlukan Perlindungan Khusus	19 Unit Layanan	Terlaksananya Kegiatan Layanan Bagi Anak Yang Mermerlukan Perlindungan Khusus	50.900.000	Bidang PHA	V		
							a. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	19 Orang	Terlaksananya Kegiatan SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50.900.000	Bidang PHA	V	19 Orang	100%
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN															
1.	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Total Kelahiran / (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 Tahun	2,35	2,35	2,35	2,35	Program : Pengendalian Penduduk Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.						1,34%		70%
2	Terkendalnya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	Angka Pemakaian Kontrasepsi. CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	69,7	69,7	69,7	69,7	Sub Kegiatan : Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal. (APBD)	- Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal.	23 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal pada 13 Kecamatan.	64.876.000	Kabid Dalduk dan PP		23 Satuan Pendidikan	100%
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi/ Unmeet-Need)	17,05	17,05	17,05	17,05	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	- Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedianya	13 Dokumen	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kepada Petugas Tenaga Lini Lapangan (PKB/PLKB dan Kader KB) sehingga terkumpulnya data dan informasi keluarga.	413.423.800	Kabid Dalduk dan PP		13 Dokumen	100%
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,68	66,68	66,68	66,68	Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK)	- Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	Terlaksananya Pemutakhiran Data Verifikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting (Verval KRS) dan Rekapitulasi Data Keluarga SIGA termasuk data setara poktan, data sdm lini lapangan di tingkat Desa Kelurahan di wilayah kerja.	82.800.000	Kabid Dalduk dan PP		1 Laporan	100%
		Angka kelahiran Remaja/ ASFR 15-19 (Kelompok Umur per 1.000 pada kelompok usia	65	65	65	65	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						18,50%		94%
							Sub Kegiatan :								

						Sub Kegiatan : Peningkatan Keseertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1212 Orang	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	830.880.000	Kabid KB dan KKK		1212 Orang	100%
						Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan Pelayanan dan Pmbinaan Kesertaan Ber-KB						100%		100%
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	- Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49 Kampung	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	221.600.000	Kabid KB dan KKK		49 Kampung	100%
						Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						85%		85%
						Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	129.420.000	Kabid KB dan KKK		10 Unit	100%
						Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						85%		85%
						Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	806.400.000	Kabid KB dan KKK		1 Laporan	100%
						Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
						Sub Kegiatan : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	672.000.000	Kabid KB dan KKK		1 Laporan	100%
						Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)								
						Sub Kegiatan : Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laopran Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan	Jumlah Laopran Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	104.000.000	Kabid KB dan KKK		1 Laporan	100%

Kuala Tungkal, Januari 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Alia Dewiana, S.Pd.
Pembina
NIP. 19721030 199203 2 004